

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis amanah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi dibidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental daerah(Darise, 2009:18).

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah akan timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat

dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber dana pendapatan termasuk dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggung jawab (Darise, 2009:190).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. Pengguna istilah "laporan keuangan" meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam standar akuntansi pemerintah berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh sumber-sumber pencatatan laporan keuangan berasal dari penerimaan dan pengeluaran untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pohuwato harus menyajikan dan menyusun

laporan keuangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, (Datau, 2007:2).

Untuk melancarkan penyajian dan penyusunan laporan keuangan, maka perlu adanya pengawasan terhadap proses pencatatan dan pelaporan. Pengawasan dapat dilakukan oleh para wakil rakyat, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman. Pengawasan dapat dilakukan secara kontinu maupun secara berkala sesuai dengan keputusan yang ditetapkan. Pengawasan tersebut meminimalkan penyimpangan-penyimpangan keuangan negara.

Fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu telah diterapkan standar akuntansi pemerintahan sejak tahun 2007, namun setelah diterapkan masih saja belum efektif dalam penyusunan laporan keuangan Hal ini terlihat dari hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 BPK memberikan opini **“wajar dengan pengecualian”**. Pemerintah Kabupaten Pohuwato menurut pendapat BPK, telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato per 31 Desember 2009, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas (LAK) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, yaitu: “Saldo Aset Tetap yang Disajikan di

Neraca Minimal Sebesar Rp330.254.007.901,00 Belum Didukung Dengan Daftar Aset Daerah yang Memadai, (BPK RI, 2009).

Masalah lain penyebab kurangnya efektivitas penyusunan laporan keuangan yaitu keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Beberapa permasalahan signifikan sehubungan dengan keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tersebut terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, BPK dalam hasil pemeriksaan menyebutkan permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Penatausahaan dan Pengendalian Atas Pengelolaan Kas Pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD Tidak Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku;
2. Penganggaran Belanja Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Alokasi dan Penggunaan yang Tepat;
3. Saldo Aset Tetap yang Disajikan di Neraca Belum Didukung Dengan Daftar Aset Daerah yang Memadai Minimal Sebesar Rp330.254.007.901,00;
4. Mekanisme Pemungutan dan Penetapan Pajak Daerah Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku;
5. Mekanisme Pemungutan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Tidak Didukung Surat Tanda Bukti Pembayaran Sejumlah Rp153.930.000,00;

6. Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Dilakukan Tanpa Dasar Hukum yang Memadai;
7. Potongan Pajak Penghasilan (PPH) atas Tunjangan/Penghasilan Lain Pimpinan dan Anggota DPRD Tidak Disetor ke Kas Negara dan Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Bendahara Pengeluaran DPRD Sejumlah Rp387.492.444,00;
8. Aset Tetap Tanah Seluas 2.345.647,20 m² Belum Bersertifikat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
9. Piutang Lain-lain Berpotensi Tidak Tertagih Senilai Rp.3.670.606.676,00;
10. Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Belum Disampaikan Oleh Penerima Sebesar Rp1.730.400.000,00 dan Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Sebesar Rp2.789.400.000,00 Tidak Didukung Oleh Keputusan Kepala Daerah;
11. Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato Belum Sepenuhnya Ditindaklanjuti.

Melihat Permasalahan tersebut, hal ini menguatkan berbagai penelitian dan teori yang mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula atau laporan keuangan yang berkualitas. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh BPK dengan tujuan untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan tersebut berkualitas pemerintah harus mempertimbangkan kesesuaian laporan

keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, (Soetjipto dan Sudikdiono, 2011: 35).

Berbagai penelitian terdahulu membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, diantaranya penelitian dari Kusumah (2012) yang dilakukan pada SKPD/OPD pemerintah Kota Tasikmalaya, hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, Selain itu penelitian dari Nugraheni dan Subaweh (2008) membuktikan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Adanya fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut. Maka penulis ingin meneliti dengan merumuskan judul penelitian” **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Pohuwato.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi masalah terhadap pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan(SAP) terhadap kualitas laporan keuangan:

1. Hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2009 BPK memberikan opini **“wajar dengan pengecualian”**. Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menyajikan secara wajar namun masih ada beberapan masalah yang ditemukan oleh BPK sehingga masih memberikan opini WDP atas laporan keuangannya dimana BPK masih menemukan saldo aset tetap yang disajikan di neraca minimal sebesar Rp.330.254.007.901,00 belum didukung dengan daftar aset daerah yang memadai.
2. Belum efektifnya penyusunan laporan keuangan daerah walaupun sudah diterapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Dikarenakan masih saja mengalami keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban terkait dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas,penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan(SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Pohuwato.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1.5.1 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPKAD kabupaten pohuwato dalam penyajian penyusunan laporan keuangan.